

>> Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023



(0321) 888197



@dinkes.jombang



Jl. dr. Sutomo No. 75 Jombang

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang dengan Karunia dan Nikmat-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi tahun 2023 dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran dan evaluasi kinerja instansi selama tahun 2023. Laporan ini berisi data kinerja yang akuntabel, meliputi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi beserta langkah-langkah alternatif solusi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Selain itu juga berisi laporan keuangan berupa data alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Penyusunan laporan demikian ini sesuai dengan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami sampaikan banyak terimakasih pada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023. Mudah-mudahan laporan ini dapat memeberikan manfaat bagi internal Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023 maupun ODP terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

Jombang, 6 Pebruari 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Jombang



SYAFUL ANWAR, ST  
NIP. 197803192005011015

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang merupakan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun dengan tujuan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2023 disusun melalui pengukuran kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2023 yang melibatkan seluruh unsur di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 16 (enam belas) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 93.3%. Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target telah mengedepankan asas efisiensi dan efektifitas dengan tingkat efisiensi 1.11-3.97 untuk Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP OPD sedangkan untuk IKU Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM) tidak didapatkan efisiensi karena tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran total tahun 2023 mencapai 89.52%. Namun, beberapa hambatan yang ditemukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sinergitas upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBAL) dengan lintas program dan lintas sektor terkait sehingga upaya penurunan kasus masih belum holistik dan terintegrasi;
2. Masih rendahnya pola pikir masyarakat tentang perilaku hidup sehat yang terlihat dari adanya sebagian masyarakat yang masih tinggal di rumah yang tidak sehat (rumah hunian jadi satu dengan kandang hewan ternak, ventilasi dan .pencahayaan yang kurang, dll), Pola Asuh yang salah pada balita, sebagian masyarakat yang tidak mengizinkan bayi dan balitanya diimunisasi, pola hidup masyarakat yang tidak sehat, perilaku masyarakat yang tidak sehat, Keluarga pasien ODGJ Berat yang tidak kooperatif dengan petugas kesehatan untuk program pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ Berat, Adanya penderita ODGJ Berat yang tidak mau hadir atau mengakses layanan kesehatan jiwa sehingga belum menunjukkan adanya perubahan perilaku;
3. Belum seluruh Puskesmas mempunyai tenaga kesehatan esensial sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan pengendalian kasus penyakit menular dan tidak menular yang belum bisa dikendalikan dengan maksimal.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan hidup bersih dan sehat termasuk rendahnya kemauan untuk memberikan imunisasi kepada anak balita.
6. Pencegahan dan penanganan stunting belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga penurunan stunting dan gizi buruk masih belum optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak Balita secara terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor terkait serta optimalisasi MPDN;
2. Penerapan *continuum of care* asuhan berkesinambungan adalah asuhan yang disediakan secara komprehensif disepanjang siklus hidup perempuan serta diberikan dalam tempat yang berkesinambungan mencakup rumah, komunitas, puskesmas, dan tempat rujukan;
3. Optimalisasi program gerakan masyarakat sehat (Germas) sebagai upaya dalam perubahan perilaku masyarakat;
4. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui *pentahelix collaborative governance* model di lingkup Kabupaten Jombang;
5. Peningkatan penyediaan tenaga kesehatan esensial di Puskesmas melalui sistem kontrak BLUD Puskesmas.
6. Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
7. Memperbaiki pola rujukan dengan menjalin kerjasama FKTP dengan FKTL;
8. Meningkatkan tingkat pengetahuan sasaran tentang Kesehatan ibu dan anak;
9. Sweeping bagi balita yang tidak datang di Posyandu dengan melibatkan Puskesmas dan Kader Kesehatan;
10. Pemberian Penyuluhan di posyandu tentang pola gizi seimbang bagi balita;
11. Pemberian pelatihan PMBA bagi pengasuh balita;
12. Penanganan Balita stunting dengan pendekatan pemenuhan Nutrisi bagi balita stunting;
13. Peningkatan dukungan lintas sektor untuk menurunkan prevalensi stunting;
14. Pemberian penyuluhan balita stunting bagi orang tua dan pengasuh balita;
15. Kunjungan rumah dan pembinaan rumah sehat;
16. Pendekatan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat kepada masyarakat untuk membangun opini masyarakat tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita;
17. Peningkatan tracing, testing dan treatment penyakit menular di Masyarakat;
18. Pelayanan di Psobindu PTM dalam rangka skrining kesehatan bagi penduduk usia produktif;
19. Pemberian layanan konseling bagi masyarakat yang sehat, penderita Hipertensi dan Diabetes Mellitus;
20. Memberikan terapi farmakologi, dan konsultasi kesehatan bagi penderita HT dan DM;
21. Melakukan kerjasama lintas program dan lintas sector untuk peningkatan kesadaran keluarga pasien ODGJ Berat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan kesehatan kesehatan jiwa bagi penderita ODGJ Berat;
22. Meningkatkan kunjungan rumah dan pendekatan intrapersonal pada penderita ODGJ berat agar mau mengakses layanan kesehatan jiwa;
23. Penyediaan buffer untuk Obat, Vaksin, dan BHP untuk mencegah kekosongan obat, vaksin dan BHP di Puskesmas.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Struktur Organisasi .....	3
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
1.6 Isu Strategis .....	9
1.7 Cascading Kinerja .....	10
1.8 Peta Proses Bisnis.....	11
1.9 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	17
II.1 Rencana Strategis .....	17
II.2 Rencana Kinerja Tahunan .....	23
II.3 Penetapan Kinerja .....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
III.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	29
III.2 Akuntabilitas Keuangan TA. 2023 .....	30
III.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.....	56
BAB IV PENUTUP .....	63

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Hal
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023.....	18
Tabel 2.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023 .....	20
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023 .....	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023.....	26
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	29
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023	30
Tabel 3.3	Capaian Kinerja 15 Indikator Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2023.....	31
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023 .....	33
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Selama 3 Tahun .....	45
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra).....	46
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Dengan Standar Nasional Tahun 2023.....	47
Tabel 3.8	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023.....	49
Tabel 3.9	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023.....	56
Tabel 3.10	Efisiensi penggunaan Anggaran Tahun 2023.....	58
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023.....	59
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023...	3
Gambar 1.2	Cascading Kinerja .....	10
Gambar 1.3	Peta Proses Bisnis.....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kesehatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Dinas Kesehatan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Kementrian Kesehatan. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Dinas Kesehatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **I.2 Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
15. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

### I.3 Maksud dan Tujuan

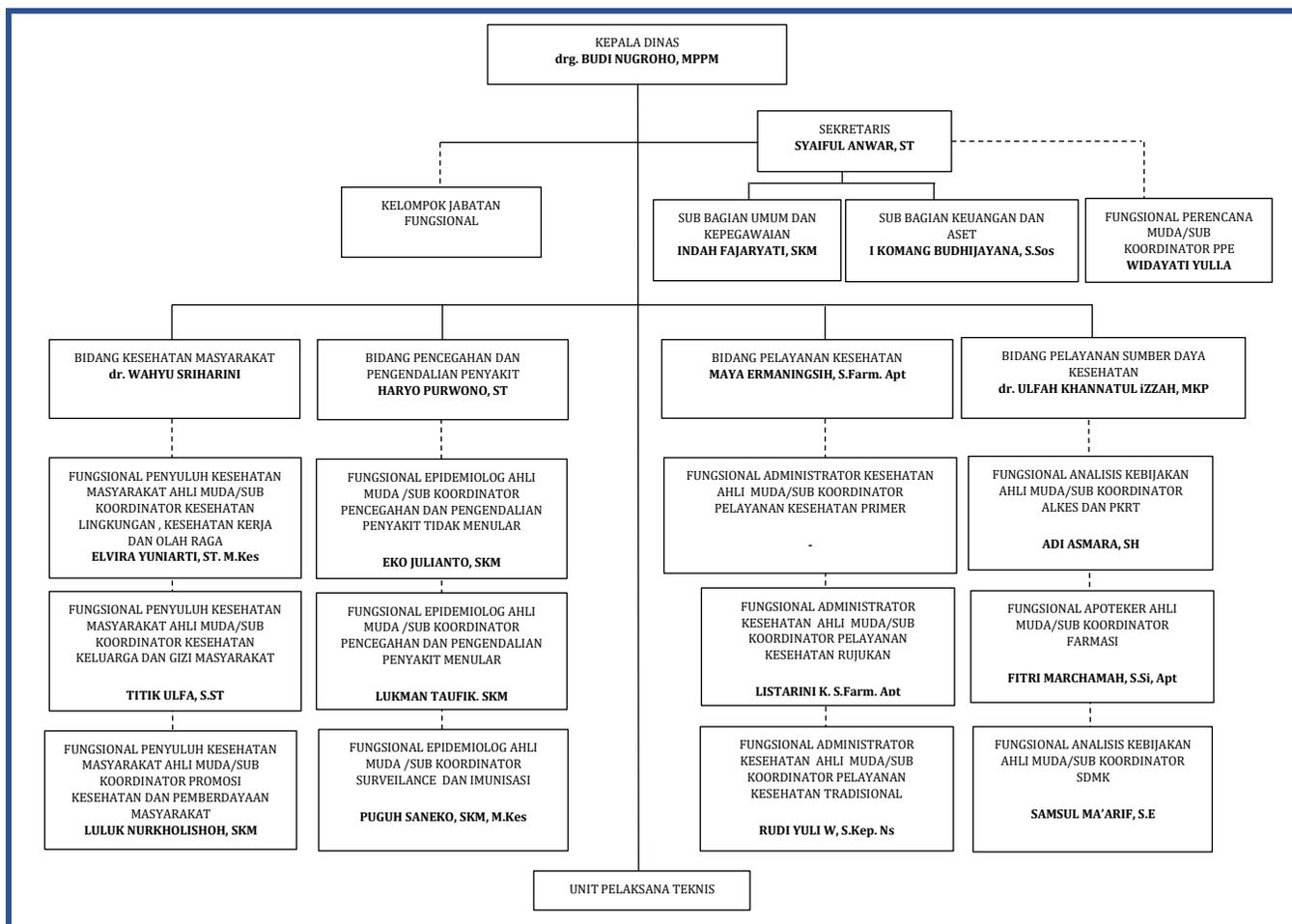
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam rentang waktu satu tahun.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan program, kegiatan, anggaran serta pengelolaan sumber daya di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan strategi perbaikan pada periode berikutnya untuk mewujudkan Dinas Kesehatan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif.

### I.4 Struktur Organisasi

Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tersaji pada gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023



## **I.5 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018. Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menyatakan bahwa tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup fungsinya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021, terdiri dari:

### **a. Kepala Dinas;**

### **b. Sekretariat;**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;

- h. Pengelolaan asset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Lap[oran Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem AKuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi:

#### **1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, letatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melakat dalam lingkup Dinas Kesehatan;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan Dinas Kesehatan;
- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

## **2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;**

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **3. Kelompok Jabatan Fungsional**

### **c. Bidang Kesehatan Masyarakat,**

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga yang berfungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; Sub Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
5. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi kelompok jabatan fungsional.

#### **d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji yang berfungsi:

1. Penyusunan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji;
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji;
4. Koordinasi di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji;
5. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **e. Bidang Pelayanan Kesehatan**

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional yang berfungsi:

1. Penyusunan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
3. Pelaksanaan Koordinasi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional; dan
  6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

**f. Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan**

Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan yang berfungsi:

1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehatan;
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan;
5. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

**f. Unit Pelaksana Teknis**

UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, kelas B;
2. UPT Instalasi Farmasi, kelas B; dan
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Puskesmas sebagai berikut:
  - Puskesmas Jelakombo Jombang;
  - Puskesmas Pulo Lor Jombang;
  - Puskesmas Jabon Jombang;
  - Puskesmas Tambakrejo Jombang;
  - Puskesmas Cukir Diwek;
  - Puskesmas Brambang Diwek;
  - Puskesmas Blimbing Gudo;

- Puskesmas Plumbongambang Gudo;
- Puskesmas Bandarkedungmulyo;
- Puskesmas Perak;
- Puskesmas Megaluh;
- Puskesmas Tembelang;
- Puskesmas Jatiwates Tembelang;
- Puskesmas Bawangan Ploso;
- Puskesmas Kabuh;
- Puskesmas Plandaan;
- Puskesmas Tapen Kudu;
- Puskesmas Keboan Ngusikan;
- Puskesmas Mojoagung;
- Puskesmas Gambiran Mojoagung;
- Puskesmas Sumobito;
- Puskesmas Jogoloyo Sumobito;
- Puskesmas Kesamben;
- Puskesmas Blimbing Kesamben;
- Puskesmas Peterongan;
- Puskesmas Dukuhklopo Peterongan;
- Puskesmas Mayangan Jogoroto;
- Puskesmas Jarakkulon Jogoroto;
- Puskesmas Pulorejo Ngoro;
- Puskesmas Kesamben Ngoro;
- Puskesmas Mojowarno;
- Puskesmas Japanan Mojowarno;
- Puskesmas Bareng;
- Puskesmas Wonosalam.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

**I.6 Isu Strategis**

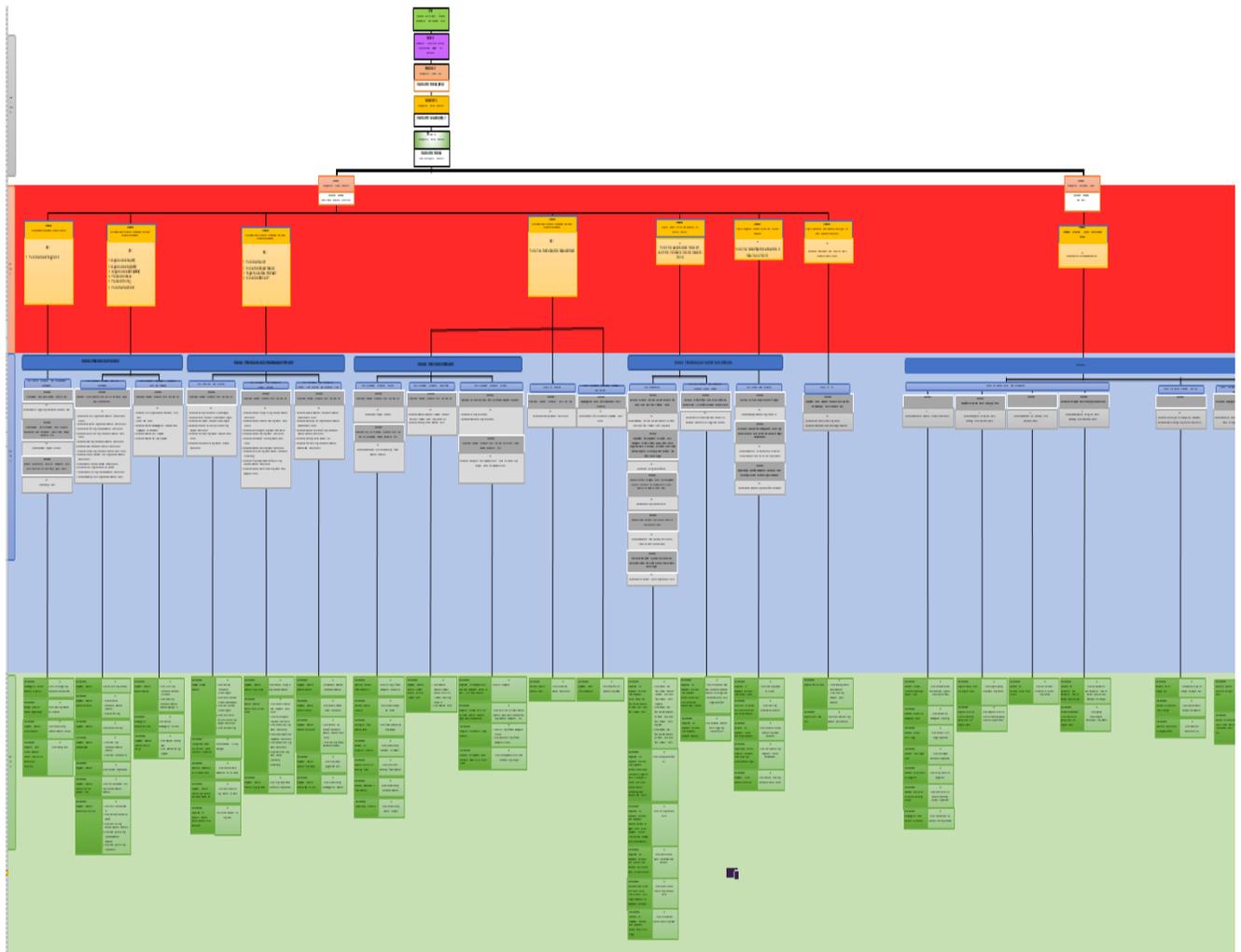
Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan Kematian Ibu, Bayi dan Balita secara terintegrasi;
2. Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Gizi Buruk Terintegrasi;

3. Peningkatan KIE kepada masyarakat melalui kelompok kelompok potensial di masyarakat tentang penyakit menular;
4. Penguatan sistem jaminan sosial kesehatan Kabupaten Jombang;
5. Mapping dan pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
6. Penguatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga; dan
7. Peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan (Continual Quality Improvement).

### I.7 Cascading Kinerja

Secara garis besar, Cascading Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

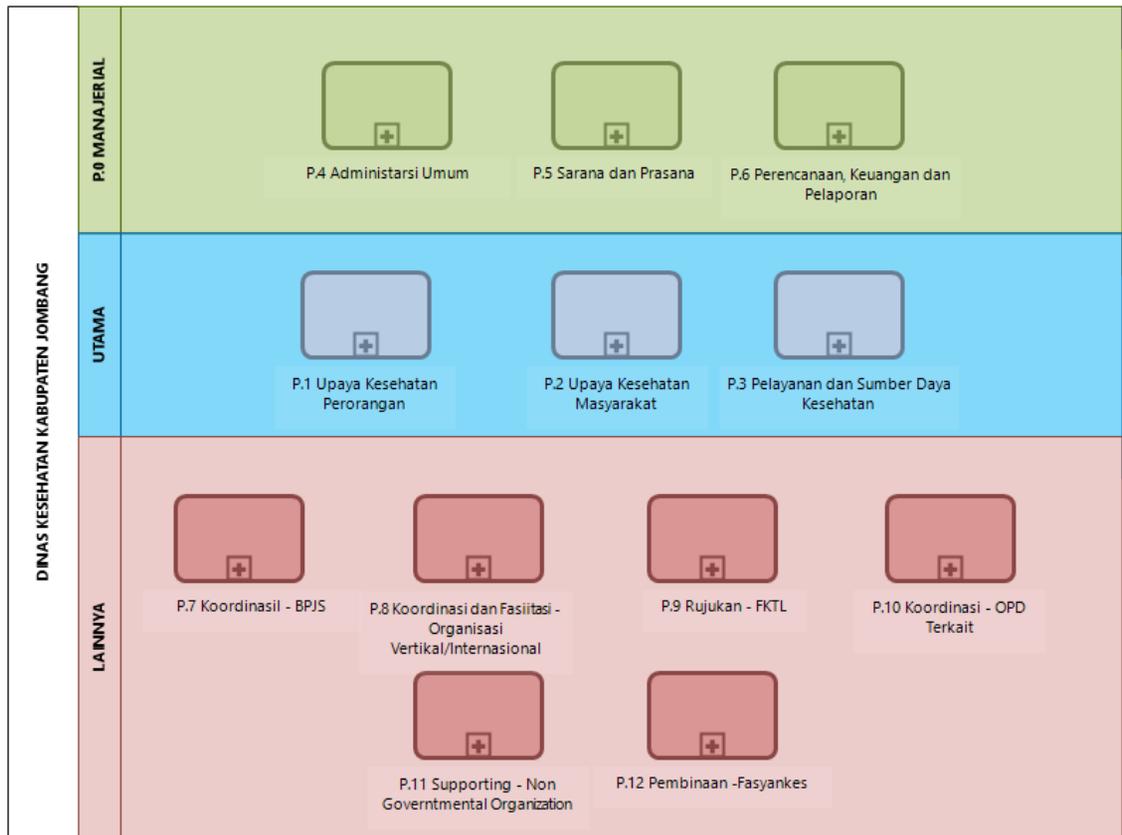


Gambar 1.1 Cascading Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

## I.8 Proses Bisnis

Peta proses Bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

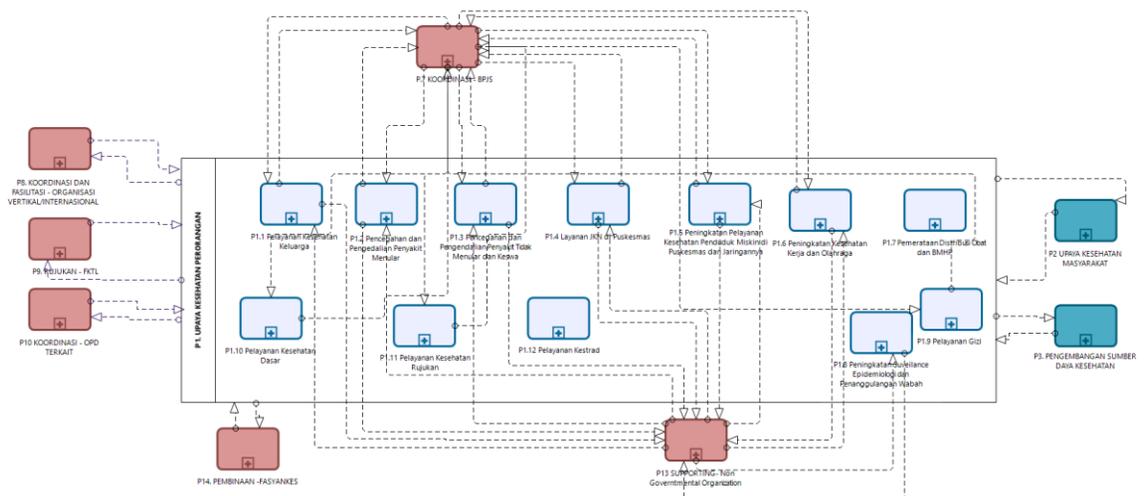
### A. Utama



Powered by  
**bizagi**  
Modeler

Gambar 1.2 Peta Prose Bisnis Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

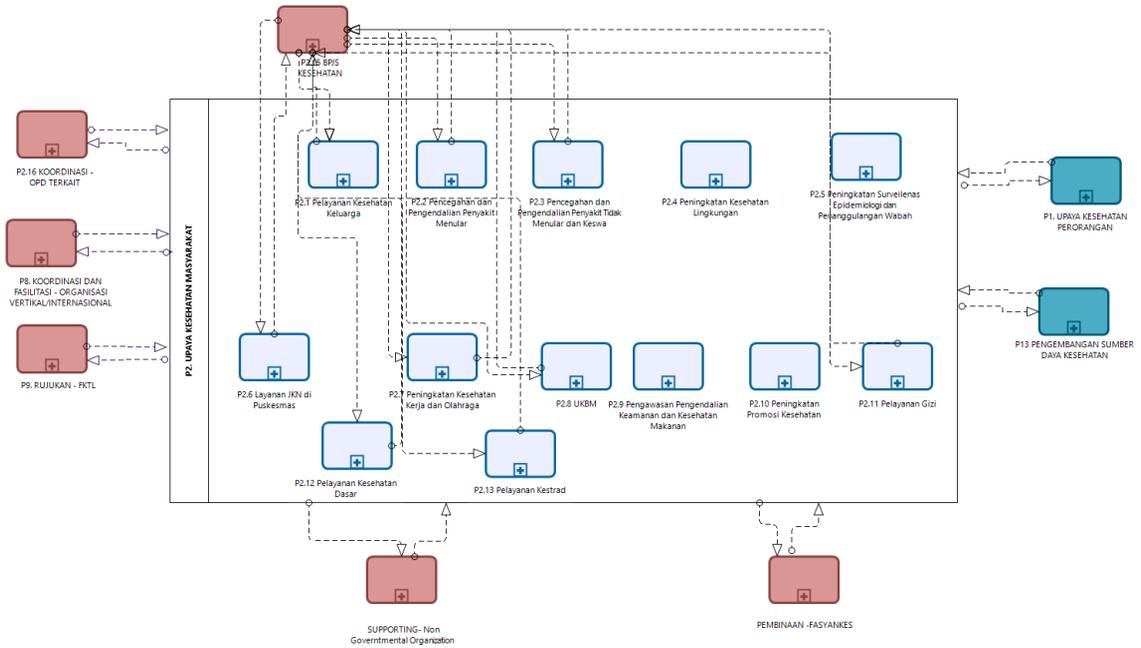
### B. Upaya Kesehatan Perorangan



Powered by  
**bizagi**  
Modeler

Gambar 1.3 Peta Prose Bisnis Upaya Kesehatan Perorangan

### C. Upaya Kesehatan Masyarakat



Gambar 1.4 Peta Prose Bisnis Upaya Kesehatan Masyarakat

### I.9 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan surat Nomor. X.700/558/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023 terkait Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023, didapatkan hasil bahwa hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja OPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah kategori A dengan Nilai 81.83 dengan catatan hasil evaluasi sebagai berikut:

#### a. Kondisi Evaluasi

##### 1) Evaluasi atas perencanaan Kinerja

a) Penetapan target kinerja atas indikator kinerja sasaran "Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat" telah memenuhi kriteria target yang dapat dicapai, namun tidak menantang dan realistis berdasarkan dokumen kertas kerja penetapan target Tahun 2023 dan LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2022. Dari data dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penetapan target kinerja Tahun 2023 belum memenuhi kriteria target kinerja yang menantang dan realistis, yaitu:

- Penetapan target kinerja tahun 2022 sebesar 1,31 telah terealisasi sebesar 2,66 namun pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 1,44 (sesuai dengan dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023).
- Penetapan target kinerja Tahun 2023 sebesar 1,44 yang dicapai melalui 15 indikator program tidak dilengkapi dengan perhitungan basis data yang memadai dan argument perhitungan yang logis.

- Tidak adanya evaluasi secara periodic atas penetapan target tahun berikutnya dengan mengacu pada capaian tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui apakah penetapan target masih relevan.
- b) Target jangka menengah Renstra telah dimonitor pencapaiannya, namun monitoring yang dilakukan sebatas menyajikan capaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 dengan target akhir Renstra Tahun 2023 beserta hambatan/kendala, alternative/upaya yang dilakukan dan tindak lanjutnya, namun terdapat catatan pada dokumen monitoring target jangka menengah Renstra yang perlu dilakukan perbaikan yaitu:
- Belum menyajikan breakdown target kinerja jangka menengah ke dalam target- target tahunan (tahun 2019, 2020 dan 2021)
  - Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas:
    - Progres capaian target jangka menengah Renstra pada 15 indikator sasaran.
    - Penetapan target tahunan apakah masih relevan yang dihubungkan dengan capaian kinerja.
  - Belum dilakukan analisa gap atas capaian antara realisasi tahun 2022 dengan target akhir renstra. (2.03.04)

## **2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 27,08 dari bobot 30% atau dengan capaian 85.36% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), sehingga masih terdapat sub komponen yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu pada keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan atas pengukuran capaian kinerja yang belum maksimal.

Kondisi ini dibuktikan dengan dokumen pengukuran kinerja individu tahun 2022 dan monitoring rencana aksi yang telah dilaporkan setiap triwulan secara berjenjang, diketahui bahwa:

- a. Pada dokumen Pengukuran Kinerja terdapat indicator kinerja yang merupakan komponen dari indicator sasaran "Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat" tidak tercapai, yaitu pada:
  - Bidang Kesehatan Masyarakat
    - Terwujudnya penurunan angka kematian ibu yang signifikan di Kabupaten Jombang
    - Terwujudnya penurunan angka kematian bayi yang signifikan di Kabupaten Jombang
  - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
    - Menurunnya insiden rate penyakit menular di Kabupaten Jombang
    - Penderita DM dan HT mendapatkan pelayanan sesuai standar
  - Bidang Pelayanan Kesehatan
    - Persentase fasilitas kesehatan memenuhi standar

Atas capaian belum cukup diungkapkan dalam kolom penjelasan dan alternative upaya yang telah dilakukan, khususnya pada realisasi yang tidak tercapai.

- b. Pada dokumen monitoring rencana aksi, untuk kolom catatan monev, tindak lanjut dan bukti pendukung belum cukup diungkapkan sesuai dokumen pendukung yang dilampirkan, sehingga tidak dapat diketahui tingkat capaian yang telah dilaksanakan.

Atas kondisi tersebut, didapat gambaran bahwa pengukuran kinerja belum dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyesuaian pada strategi, kebijakan dan anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien sehingga berdampak pada pencapaian kinerja.

### **3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 7,91 dari bobot 15% atau dengan capaian 52,74% (C) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria sebagian kecil telah terpenuhi (>25%-50%), sehingga masih terdapat sub komponen yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- a) Penyajian data dan informasi atas upaya nyata dan/atau hambatan capaian kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja tidak sesuai dengan dokumen pengukuran kinerja tahun 2022 dan monitoring rencana aksi.
- b) Pemanfaatan informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum dijadikan dasar untuk penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya, penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

### **4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi**

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 21.91 dari bobot 25% atau dengan capaian 87,63% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), sehingga masih terdapat sub komponen yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi belum dilakukan secara maksimal, kondisi ini dapat diketahui dengan adanya penurunan pada sub komponen kualitas dan implementasi Pengukuran Kinerja yang tidak dievaluasi untuk mengidentifikasi penyesuaian kebijakan atau aktivitas yang kurang mendukung capaian kinerja.
- b) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (peningkatan capaian kinerja outcome) serta mendukung dalam proses efektivitas dan efisiensi kinerja.

## b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, agar:

### 1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan evaluasi secara periodic atas penetapan target kinerja tahun berikutnya dengan mengacu pada capaian tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui apakah penetapan target masih relevan
- b. Selanjutnya dalam menetapkan target kinerja terutama pada Indikator Kinerja Utama agar:
  - Mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan factor lain yang mempengaruhi.
  - Memberikan argument berdasarkan basis data dan perhitungan yang logis
- c. Melakukan revisi atas hasil monitoring target jangka menengah dalam Renstra, yaitu:
  - Menyajikan breakdown target kinerja jangka menengah ke dalam target-target tahunan (Tahun 2019, 2020 dan 2021)
  - Menyajikan hasil monitoring dan evaluasi atas:
    - Progres capaian target jangka menengah Renstra pada 15 indikator sasaran
    - Penetapan target tahunan apakah masih relevan dihubungkan dengan capaian kinerja
  - Melakukan analisa gap atas capaian antara realisasi tahun 2022 dengan target akhir renstra

### 2. Pengukuran Kinerja

Agar lebih optimal dalam melakukan evaluasi pada dokumen Pengukuran Kinerja dan Monitoring Rencana Aksi, sehingga dapat diketahui capaian kinerja setiap tribulan dan dapat segera dilakukan penyesuaian strategi, kebijakan dan anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien sehingga berdampak pada pencapaian kinerja.

### 3. Pelaporan Kinerja

- a. Penyajian data dan informasi atas upaya nyata dan/atau hambatan capaian kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja agar disesuaikan dengan dokumen pengukuran kinerja tahun 2022 dan monitoring rencana aksi.
- b. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya, penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran.

#### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi**

- a. Meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi sehingga terdapat peningkatan nilai pada sub komponen SAKIP agar evaluasi internal dapat mengidentifikasi kebijakan, aktivitas yang dinilai kurang mendukung pencapaian kinerja sehingga dapat dilakukan penyesuaian perencanaan kinerja.
- b. Menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (peningkatan capaian kinerja outcome) serta mendukung dalam proses efektivitas dan efisiensi kinerja.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### II.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis atau yang disebut RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Rencana Strategis Kabupaten Jombang disusun dalam bentuk perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang. Dengan demikian, secara substantif dokumen Renstra harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Jombang 2018-2023.

##### 1. Visi

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mengikuti visi Kabupaten Jombang yaitu **"Bersama Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing."** Mengacu pada visi tersebut, kemudian ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 sebagai bentuk upaya mencapai visi tersebut. Ke-3 (tiga) misi Kabupaten Jombang yaitu:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional
- 2) Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya.
- 3) Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal dan Industri.

##### 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Misi Kabupaten Jombang di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mengemban Misi yang ke dua yaitu ikut **Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya.**

Hal tersebut, mengingat secara umum bahwa semakin pentingnya pelayanan kesehatan yang harus diberikan kepada masyarakat. Secara singkat, kesehatan menjadi salah satu bidang layanan dasar yang secara terus-menerus akan dibutuhkan oleh masyarakat sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagai OPD penyedia layanan kesehatan diharuskan mampu memenuhi tuntutan tersebut, di mana berkaitan di dalamnya mengenai penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

### 3. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan kabupaten Jombang adalah **Meningkatkan Derajat Kesehatan**, dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.

### 4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan sebagaimana terlihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat
2.	Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP

### 5. Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

#### a. Kebijakan

Dengan memperhatikan sasaran di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan Pelayanan Kesehatan bagi seluruh kelompok usia mengikuti siklus hidup sejak dari bayi sampai anak, remaja, kelompok usia produktif, maternal dan kelompok usia lanjut;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
3. Pengembangan program inovatif dari petugas kesehatan masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular terutama hak akses pengamatan faktor resiko dan penyakit dan penentuan langkah penanggulangannya;
4. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit melalui community base surveillance berbasis masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap hal hal yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan melaporkannya kepada petugas;

5. Deteksi dini secara proaktif mengunjungi masyarakat karena sebagian besar masyarakat tidak tahu kalau dirinya menderita penyakit tidak menular;
6. Terjaminnya ketersediaan obat dan vaksin untuk pengendalian penyakit menular;
7. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi;
8. Peningkatan peran Puskesmas dan lintas sektor dalam pencapaian kecamatan/kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan;
9. Penyusunan regulasi daerah yang dapat menggerakkan sektor lain untuk berperan aktif dalam pelaksanaan penyehatan lingkungan seperti tatanan kawasan sehat;
10. Pembinaan dan pengawasan di sarana distribusi kosmetik, obat, obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan minuman secara periodik dalam hal penyalahgunaan bahan berbahaya;
11. Semua industri rumah tangga pangan mengikuti penyuluhan keamanan pangan;
12. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis masyarakat;
13. Peningkatan pelaksanaan PHBS;
14. Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan preventif secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber pembiayaan Puskesmas;
15. Seluruh masyarakat miskin terlayani dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) dengan kualifikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan masyarakat tidak miskin meningkat partisipasinya dalam kepesertaannya di BPJS secara mandiri (Non PBI) dan pengelolaan obat berdasarkan perencanaan secara terpadu yang melibatkan seluruh unsur terkait;
16. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
17. Peningkatan Kemampuan Teknis dan Manajemen Puskesmas;
18. Peningkatan Pembiayaan;
19. Peningkatan Sistem Informasi Puskesmas;
20. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas.

b. Strategi

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai sebagaimana dimaksud di atas, maka Strategi Dinas Kesehatan dirumuskan sebagai berikut :

1. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (*continuum of care*);
2. Meningkatkan pelaksanaan program inovasi untuk mendukung penurunan AKI, AKB, dan AKBAL;
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular;
4. Sinergitas Lintas Program, Lintas Sektor dan Stakeholder terkait dalam pembangunan bidang kesehatan;
5. Intervensi berbasis risiko kesehatan;
6. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat;

7. Peningkatan akses layanan kesehatan bagi penduduk khususnya masyarakat miskin Kabupaten Jombang melalui pemberlakuan Kartu Jombang Sehat;
  8. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer.
- c. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk mencapai Strategi, Kebijakan, Sasaran, dan Tujuan Dinas Kesehatan tersebut, terlihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023**

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
		Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Obat, Vaksin
		Pengadaan Bahan Habis Pakai
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan & Distribusi Serta Pemerataan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas Tertentu dan PKRT Kelas Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

## II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. Oleh karena itu, Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2022 memuat langkah-langkah untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Sasaran-sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih tajam dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target			
							Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
							Rp	Kinerja	Rp	Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	Nilai	1,44	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	40,003,993,795	96 per 100.000KH	134,462,382,373	96 per 100.000 KH
						Angka kematian bayi		6,6 per 1.000 KH		6,6 per 1000 KH
						Angka kematian balita		5,4 per 1.000 KH		5,4 per 1000 KH
						Prevalensi gizi buruk		<25%		2%
						Prevalensi stunting		13%		13%
						Persentase rumah sehat		81%		81%
						Persentase desa UCI		87%		87%
						Insiden rate penyakit menular		1,2%		1,2%
						Insiden rate penyakit DM dan HT		16%		65%
						Tingkat kemandirian ODGJ berat		92%		65%
						Persentase fasilitas kesehatan memenuhi standar		94%		80%
						Persentase ketersediaan obat, vaksin dan PHP di FKTP sesuai kebutuhan		87%		94%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target			
							Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
							Rp	Kinerja	Rp	Kinerja
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia di faskes memenuhi standar	136,573,500	100%	2,669,707,785	100%
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Penyedia sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	90,299,500	58%	478,497,600	58%
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Sehat	249,553,800	80%	1,252,574,600	80%
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rata rata capaian kinerja aparatur	92,327,325,316	100%	92,836,350,283	100%
<b>JUMLAH</b>							<b>132,807,745,911</b>		<b>231,699,512,641</b>	

### II.3 PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara revidi instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Kepala Dinas Kesehatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KESEHATAN TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1,44
2.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	A (81.5)

No	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target	Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Meningkatnya Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Prorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	96 per 100.000 KH	40,003,993,795	134,462,382,373
			2. Angka Kematian Bayi (AKB)	6.6/1.000 KH		
			3. Angka Kematian Balita	5.4/1.000 KH		
			4. Prevalensi Gizi Buruk	2%		
			5. Prevalensi Stunting	13%		
			6. Presentase Rumah Sehat	81%		
			7. Presentase Desa UCI	87%		
			8. Insiden Rate Penyakit Menular	1.2%		
			9. Angka Kesakitan Penyakit DM dan HT	65%		
			10. Tingkat Kemandirian ODGJ Berat	65%		
			11. Presentase fasilitasi kesehatan memenuhi standar	80%		
			12. Presentase ketersediaan Obat, vaksin dan BHP di FKTP sesuai kebutuhan	94%		
2	Meningkatnya capaian program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di Faskes sesuai Standar	100%	136,573,500	2,669,707,785
3	Meningkatnya capaian program farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase penyedia sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	58%	90,299,500	478,497,600
4	Meningkatnya capaian program pemberdayaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	80%	249,553,800	1,252,574,600

No	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target	Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	masyarakat bidang kesehatan					
5	Meningkatnya pemenuhan peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	92,327,325,316	92,836,350,283
<b>JUMLAH</b>					<b>132,807,745,911</b>	<b>231,699,512,641</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Kesehatan sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui Pengukuran Kinerja. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Untuk memudahkan interpretasi pencapaian indikator sasaran dalam penilaian kinerja digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>NO</b>	<b>JUMLAH NILAI</b>	<b>KATEGORI</b>
1	> 110%-120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>80%-110%	Baik (Berhasil)
3	>70%-80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>50%-70%	Kurang
5	0%-50%	Sangat Kurang

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kerja (*Performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

#### 1. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### 2. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

#### 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023 terlihat pada tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023**

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1,44	0,94	65,09%
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A (81.5)	A (81.83)	100,4%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP dengan hasil perhitungan indeks kualitas kesehatan masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja 15 Indikator Kualitas Kesehatan Masyarakat**  
**Tahun 2023**

No	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Bobot	Indeks
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	96/ 100000KH	134,49/ 100000KH	71%	7%	0,05
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,6/1000KH	7,02/1000KH	94%	7%	0,07
3	Angka Kematian Balita (Akbal)	5,4/1000KH	8,3/1000KH	65%	7%	0,05
4	Prevalensi Gizi Buruk	2%	0,59%	120%	7%	0,08
5	Prevalensi Stunting	13%	6,30%	120%	7%	0,08
6	Persentase Rumah sehat	81%	88,46%	109%	6%	0,07
7	Persentase Desa UCI	87%	73,20%	84%	6%	0,05
8	Angka Kesakitan Penyakit DM dan HT	65%	77,99%	83%	7%	0,06
9	Tingkat Kemandirian ODGJ Berat	65%	60,42%	93%	6%	0,06
10	Persentase Rumah Tangga Sehat	80%	46%	57%	7%	0,04
11	Persentase fasilitas kesehatan memenuhi standar	80%	88,46%	111%	8%	0,09
12	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan BHP di FKTP sesuai kebutuhan	94%	94%	100%	6%	0,06
13	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	58%	99,99%	120%	6%	0,07
14	Insiden Rate Penyakit Menular	1,2%	1,86%	65%	7%	0,05
15	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di Faskes Sesuai Standar	100%	100%	120%	6%	0,07
<b>IKKM TAHUN 2023</b>						<b>0,94</b>

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023

Tabel 3.2 menunjukkan sasaran strategis pertama dengan indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 65,09% (Kurang).

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dikarenakan tidak tercapainya indikator kinerja program sebagai komponen penyusunan Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.3. Faktor penghambat tidak tercapainya target IKKM di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Tingginya Angka Kematian Anak Balita (AKBAL);
4. Belum terwujudnya desa UCI;
5. Tingginya Insiden Rate Penyakit DM dan HT;
6. Rendahnya Tingkat Kemandirian ODGJ Berat;
7. Rendahnya Persentase Rumah Tangga Sehat; dan
8. Tingginya Insiden Rate Penyakit Menular

Sedangkan faktor pendorong tercapainya target IKKM di Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah:

1. Rendahnya prevalensi gizi buruk;
2. Rendahnya prevalensi stunting;
3. Meningkatnya rumah sehat;
4. Meningkatnya fasilitas kesehatan yang memenuhi standar;
5. Terpenuhinya ketersediaan obat, vaksin dan BHP di FKTP sesuai kebutuhan;
6. Meningkatnya Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar; dan
7. Ketersediaan tenaga kesehatan di faskes sesuai standar.

Sebagai upaya dalam mencapai target Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM) di Kabupaten Jombang pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang melaksanakan aktivitas yang tertuang dalam kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub kegiatan**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023**

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	5 Laporan	5 Laporan	100%	Baik (Berhasil)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1291 Orang/ Bulan	1225 Orang/ Bulan	95%	Baik (Berhasil)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	Baik (Berhasil)
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)
		Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	Baik (Berhasil)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 paket	48 paket	100%	Baik (Berhasil)
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 paket	26 paket	100%	Baik (Berhasil)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	Baik (Berhasil)
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	Baik (Berhasil)
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	Baik (Berhasil)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusasn Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Baik (Berhasil)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	79 unit	79 unit	100%	Baik (Berhasil)

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 unit	55 unit	100%	Baik (Berhasil)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%	Baik (Berhasil)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Persentase item obat dan BMHP yang diadakan	95 %	96 %	101%	Baik (Berhasil)
			Persentase ketersediaan vaksin sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)
			Persentase ketersediaan prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)
		Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	100%	Baik (Berhasil)
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	3 Unit	100%	Baik (Berhasil)
		Pengadaan Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%	Baik (Berhasil)
		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100%	Baik (Berhasil)
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	Baik (Berhasil)
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	Baik (Berhasil)	

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal	100 %	87,63 %	88%	Butuh Perbaikan (Cukup)
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	90,06 %	90%	Baik (Berhasil)
			Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	93,88 %	94%	Baik (Berhasil)
			Persentase balita yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	102,18 %	102%	Baik (Berhasil)
			Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	98,39 %	98%	Baik (Berhasil)
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	99,5 %	99,5%	Baik (Berhasil)
			Persentase Penderita Terduga TB yang mendapat Pelayanan sesuai standar	100 %	123,84 %	123,8%	Istimewa (Sangat Berhasil)
			Persentase dengan Resiko terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Sesuai Standar	100 %	125,1 %	125%	Istimewa (Sangat Berhasil)
			Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	76,1 %	76%	Butuh Perbaikan
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	98,4 %	98%	Baik (Berhasil)
			Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	92,4 %	92%	Baik (Berhasil)
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart	100 %	107,99 %	108%	Baik (Berhasil)
			Persentase FKTP terakreditasi	100	81,25	81%	Baik (Berhasil)

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
			Persentase pemenuhan dokumen hasil pengelolaan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.811 Orang	15.975 Orang	81%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.911 Orang	15.762 Orang	83%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.010 Orang	15.622 Orang	87%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.634 Orang	70.623 Orang	96%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	213.412 Orang	212.364 Orang	100%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	810.368 Orang	748 Orang	0%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123.769 Orang	121.778 Orang	98%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	387.550 Orang	295 Orang	0%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36.333 Orang	36.333 Orang	100%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan	2.438 Orang	2.633 Orang	108%	Baik (Berhasil)

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terduga Tuberculosis	Jumlah Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	34.261 Orang	34.261 Orang	100%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24.291 Orang	31.459 Orang	120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	165 Paket	31 Paket	19%	Sangat Kurang
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	48 Unit	65 Unit	120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan	100%	Baik (Berhasil)
		Penyediaan dan Pengelolaan SPGDT	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1 unit	100%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan dengan HIV (ODHIV)	Jumlah dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2561 Orang	989 Orang	39%	Sangat Kurang
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	7 Orang	10 Orang	143%	Istimewa (Sangat Berhasil)
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya sesuai standar	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan prizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	14 unit	14 unit	100%	Baik (Berhasil)
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 unit	1 unit	100%	Baik (Berhasil)
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	34 Unit	34 Unit	100%	Baik (Berhasil)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian izin praktik Tenaga kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP	80 %	98 %	120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
		Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kabupaten/Kota		Persentase kebutuhan dan pemberdayaan sumberdaya manusiakesehatan untuk UKP dan UKM yang terpenuhi	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	39 Orang	39 Orang	100%	Baik (Berhasil)

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikat kompetensi	100 %	135 %	120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	140 Orang	190 Orang	120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian izin apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
	Pemberian sertifikat produksi untuk Sarana produksi alat kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah tangga		Persentase sarana produksi alkes kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga bersertifikat	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)
		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat produksi untuk Sarana produksi alat kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
		Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah tangga	PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				
		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP yang bersertifikat PKP	58 %	100 %	120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang memenuhi syarat	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan		Jumlah sentra makanan jajanan memperoleh stiker pembinaan	60 %	100 %	120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
	Pemeriksaan dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga		Persentase produk makanan minuman yang memenuhi syarat	74 %	99,96 %	120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
		Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	200 Sarana	300 Sarana	120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Keluarga Sehat	22 %	30,15 %	120%	Istimewa (Sangat Berhasil)

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>Kriteria</b>
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rumah tangga yang mendapatkan intervensi PHBS	100 %	100 %	100%	Baik (Berhasil)
		Penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)
	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase UKBM yang naik stratanya	18 %	5,18 %	29%	Sangat Kurang
		Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik (Berhasil)

Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagai salah satu Instansi Pemerintah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat. Oleh sebab itu Dinas Kesehatan mencanangkan target indikator kinerja 81,5 (A). Dari target kinerja ini Dinas Kesehatan mampu mencapai Nilai Evaluasi SAKIP sebesar 81,83 (A). Sehingga capaian kinerja Dinas Kesehatan untuk indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP melebihi 100% yaitu 100,4%.

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja SAKIP adalah semakin meningkatnya komitmen seluruh pegawai lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya pembangunan di bidang kesehatan.

### 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Perkembangan realisasi sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang selama 3 tahun dapat dilihat dalam tabel 3.5 berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Selama 3 Tahun**

Indikator Kinerja	Formula	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kulaitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM)= Jumlah Capaian 15 indikator dikali bobot masing-masing indikator, sebagai berikut: (I1xB1)+ (I2xB2)+ (I3xB3)+ (I4xB4)+ (I5xB5)+ (I5xB5)+ (I6xB6)+ (I7xB7)+ (I8xB8)+ (I9xB9)+ (I10xB10)+ (I11xB11)+ (I12xB12)+ (I13xB13)+ (I14xB14)+ (I15xB15)	1,19	0,99	51,83%	1,31	1,02	77,86%	1,44	0,94	65,09%
Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP	74	76.46	103%	BB (76.43)	A (81.09)	103.86%	A (81.5)	A (81.83)	100,4

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa capaian Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 12,77% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022.

Sedangkan secara angka, Nilai SAKIP Dinas Kesehatan KAbupaten Jombang mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir.

### 3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah/akhir periode Renstra (2018-2023) dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)**

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kulaitas Kesehatan Masyarakat	1,44	0,94	65,09%
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A (81.5)	A (81,83)	100,4%

Tahun 2023 merupakan tahun kelima target jangka menengah atau akhir periode renstra di Kabupaten Jombang. Tabel 3.6 menunjukkan bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja sampai dengan akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat ketercapaian IKU Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM) di Kabupaten Jombang adalah sebesar 65.09% dari target 100%.
- b. Tingkat ketercapaian IKU Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebesar 100,4% dari target 100%.

Dengan demikian, diperlukan upaya yang berdaya ungkit pada semua bidang dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024 melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap penetapan target kinerja pada periode berikutnya sesuai dengan trend capaian kinerja serta ketersediaan sumber daya organisasi. Peningkatan komitmen seluruh karyawan dalam peningkatan kinerja Dinas Kesehatan pada periode mendatang juga merupakan modal utama sehingga terwujud sinergitas yang baik antar bidang dan bagian di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

### 3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM) merupakan indikator yang tersusun dari 15 (lima belas) komponen utama dan digunakan di lingkup Kabupaten Jombang. Sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional. Namun, ada beberapa komponen penyusun IKKM (indikator program) yang juga menjadi ukuran kinerja Kementerian Kesehatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Dengan Standar Nasional Tahun 2023**

Indikator	Realisasi Tahun n	Realisasi Nasional	Keterangan
<b>Indikator Sasaran</b>			
Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	0,94	-	IKKM merupakan indikator yang bersifat kewilayahan khusus Kabupaten Jombang
<b>Komponen Penyusun (Indikator Program)</b>			
1. Angka Kematian Ibu	134,49/100.000 KH	-	Belum bisa dibandingkan dengan realisasi nasional
2. Angka kematian bayi	7,02/1.000 KH	-	
3. Angka kematian balita	8,3/1.000 KH	-	
4. Prevalensi gizi buruk	0,59%	-	
5. Prevalensi stunting	6,3%	-	
6. Persentase rumah sehat	88,46%	-	
7. Persentase desa UCI	73,2%	-	
8. Insiden rate penyakit menular	1,86%	-	Indikator kewilayahan
9. Insiden rate penyakit DM dan HT	77,99%	-	Indikator kewilayahan
10. Tingkat kemandirian ODGJ berat	60,42%	-	Indikator kewilayahan
11. Persentase fasilitas kesehatan memenuhi standar	88,46%	-	Belum bisa dibandingkan dengan realisasi nasional
12. Persentase ketersediaan obat, vaksin dan PHP di FKTP sesuai kebutuhan	94%	-	
13. Persentase Rumah Tangga Sehat	46%	-	
14. Persentase sumber daya manusia kesehatan di faskes memenuhi standar	100%	-	Indikator kewilayahan
15. Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	99,99%	-	Indikator kewilayahan

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa IKU Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM) merupakan target yang bersifat kewilayahan khusus Kabupaten Jombang sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat merupakan indikator yang tersusun atas 15 (lima belas) indikator program. Dari 15 (lima belas) indikator program tersebut, terdapat beberapa indikator yang bersifat kewilayahan khusus di Kabupaten Jombang sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target nasional. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM)
2. Insiden Rate Penyakit Menular
3. Insiden Rate Penyakit DM dan HT
4. Tingkat Kemandirian ODGJ berat
5. Persentase sumber daya manusia kesehatan di faskes memenuhi standar
6. Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar

Dari indikator program penyusun IKKM, terdapat 10 (sepuluh) indikator program yang seharusnya bisa dibandingkan dengan realisasi Nasional yaitu:

1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Angka Kematian Anak Balita (AKBAL)
4. Prevalensi Gizi Buruk
5. Prevelensi Stunting
6. Persentase Rumah Sehat
7. Persentase Desa UCI
8. Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar
9. Persentase ketersediaan obat, vaksin dan PHP di FKTP sesuai kebutuhan
10. Persentase Rumah Tangga Sehat

Namun, dikarenakan sampai saat ini Profil Kesehatan Nasional Tahun 2023 belum dikeluarkan maka data pembandingan di tingkat nasional masih belum ada sehingga belum bisa dilakukan analisis tingkat ketercapaian indikator kinerja dibandingkan dengan target nasional.

### **3.1.5 Analisis Atas Realisasi Kinerja**

Dengan memperhatikan pencapaian kinerja tahun 2023, maka dapat diinformasikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian sasaran serta tindak lanjut atas faktor penghambat sebagaimana terlihat dalam tabel 3.9 sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Prorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
				1) Angka Kematian Ibu (AKI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kegiatan Pendampingan Bumil Risiko tinggi,</li> <li>2. Adanya kegiatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas</li> <li>3. Adanya Puskesmas PONED</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola Rujukan Ibu Hamil komplikasi yang terlambat</li> <li>2. Ibu hamil dan keluarga kurang mampu mengenali tanda bahaya kehamilan atau nifas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki pola rujukan dengan menjalin kerjasama FKTP dengan FKTL;</li> <li>2. Meningkatkan tingkat pengetahuan</li> </ol>
				2) Angka Kematian Bayi (AKB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pelayanan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)</li> <li>2. Adanya Pelayanan Kesehatan Bayi</li> <li>3. Adanya MTBS</li> <li>4. Adanya Pelayanan Imunisasi Bayi dasar Lengkap</li> </ol>	Sebagian besar kematian bayi dikarenakan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan <i>continuum of care</i> asuhan berkesinambungan adalah asuhan yang disediakan secara komprehensif disepanjang siklus hidup perempuan serta diberikan dalam tempat yang berkesinambungan mencakup rumah, komunitas, puskesmas, dan tempat rujukan;</li> </ol>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi
							2. Peningkatan pengendalian penyakit;
			3)	Angka Kematian Balita	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pelayanan Balita Paripurna;</li> <li>2. Adanya pelayanan MTBM</li> <li>3. Adanya pelayanan Posyandu Balita</li> <li>4. Adanya Pelayanan Imunisasi Balita.</li> </ol>	Adanya kekhawatiran ibu membawa balita ke Posyandu pada masa pandemi covid-19 dan sempat ada kekosongan vaksin	Sweeping bagi balita yang tidak datang di Posyandu dengan melibatkan Puskesmas dan Kader kesehatan
			4)	Prevalensi Gizi Buruk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kegiatan Pelacakan Balita Gizi Buruk;</li> <li>2. Adanya layanan Taman Pemulihan Gizi (TPG) bagi Balita Gizi Buruk;</li> <li>3. Adanya Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bagi Anak).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pola Asuh yang salah pada balita;</li> <li>2. Pengasuh kurang telaten memberi makanan dan asupan gizi lainnya bagi balita;</li> <li>3. Adanya penyakit penyerta pada balita.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Penyuluhan di posyandu tentang pola gizi seimbang bagi balita;</li> <li>2. Pemberian pelatihan PMBA bagi pengasuh balita;</li> </ol>
			5)	Prevalensi Stunting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya support Dana Desa untuk Penurunan Prevalensi Stunting;</li> <li>2. Adanya support kebijakan dari stakeholder untuk penurunan prevalensi Stunting;</li> <li>3. Adanya Tim Lintas Sektor pengendalian Stunting.</li> </ol>	Adanya balita kurang Energi Protein;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan Balita stunting dengan pendekatan pemenuhan Nutrisi bagi balita stunting;</li> <li>2. Peningkatan dukungan lintas sektor untuk menurunkan prevalensi stunting'</li> </ol>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi
							3. Pemberian penyuluhan balita stunting bagi orang tua dan pengasuh balita..
				6) Persentase Rumah Sehat	Semakin banyaknya masyarakat yang sadar tentang rumah sehat memenuhi syarat higiene sanitasi.	Masih ada sebagian masyarakat yang masih tinggal di rumah yang tidak sehat (rumah hunian jadi satu dengan kandang hewan ternak, ventilasi dan .pencahayaan yang kurang, dll).	Kunjungan rumah dan pembinaan rumah sehat.
				7) Persentase Desa UCI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program imunisasi anak sekolah</li> <li>2. Meningkatnya Kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita.</li> </ol>	1. Masih adanya sebagian masyarakat yang tidak mengizinkan bayi dan balitanya diimunisasi.	Pendekatan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat kepada masyarakat untuk membangun opini masyarakat tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi
				8) Insiden Rate Penyakit Menular	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin sadarnya masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.</li> <li>2. Sebagian masyarakat sudah semakin mandiri menangani masalah kesehatannya dengan asuhan mandiri dan telemedisin.</li> </ol>	Peningkatan kasus kasus penyakit menular di masyarakat seperti HIV dan TBC	Peningkatan tracing, testing dan treatment penyakit menular di masyarakat
				9) Insiden Rate DM dan HT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakannya program GERMAS</li> <li>2. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga rutin;</li> <li>3. Kesadaran masyarakat untuk mengatur pola makan dan menu gizi seimbang;</li> <li>4. Kesadaran masyarakat untuk tidak merokok.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pola hidup masyarakat yang tidak sehat;</li> <li>2. Adanya perilaku masyarakat yang tidak sehat;</li> <li>3. Kurangnya keseimbangan antara bekerja dengan refreshing dan istirahat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan di Posbindu PTM dalam rangka skrining kesehatan bagi penduduk usia produktif.</li> <li>2. Pemberian layanan konseling bagi masyarakat yang sehat, mendekati sakit HT dan DM;</li> <li>3. Memberikan terapi farmakologi, dan konsultasi kesehatan bagi penderita HT dan DM.</li> </ol>
				10) Tingkat Kemandirian ODGJ Berat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posyandu Jiwa</li> <li>2. Pelatihan Kerja dan prakarya bagi ODGJ Berat</li> <li>3. Melibatkan ODGJ berat dalam pekerjaan social, misalnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga pasien ODGJ Berat yang tidak kooperatif dengan petugas kesehatan untuk program pelayanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan kerjasama lintas program dan lintas sector untuk peningkatan kesadaran keluarga pasien ODGJ Berat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan</li> </ol>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi
					diberdayakan membantu sebagai kader posyandu, dll.	<p>kesehatan jiwa bagi ODGJ Berat;</p> <p>2. Adanya penderita ODGJ Berat yang tidak mau hadir atau mengakses layanan kesehatan jiwa (missal: Posyandu Jiwa)</p>	<p>kesehatan kesehatan jiwa bagi penderita ODGJ Berat;</p> <p>4. Meningkatkan kunjungan rumah dan pendekatan intrapersonal pada penderita ODGJ berat agar mau mengakses layanan kesehatan jiwa.</p>
				11) Persentase fasilitas kesehatan memenuhi standar	<p>1. Komitmen Tim Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK)</p> <p>2. Komitmen Tim Mutu Faskes</p>	1. Keterbatasan anggaran di FKTP khususnya klinik swasta	<i>Continual Quality Improvement</i>
				12) Persentase ketersediaan Obat, vaksin dan BHP di FKTP sesuai kebutuhan	<p>1. Obat, vaksin dan BHP di FKTP ketersediaannya dicukupi di Dinas kesehatan;</p> <p>2. Perencanaan kebutuhan yang tepat untuk pengadaan Obat, Vaksin, dan BHP di Dnas Kesehatan.</p>	<p>1. Kelangkaan Suppaly/produksi dari penyedia untuk Obat, vaksin dan BHP.</p> <p>2. Keterlambatan jadwal penerbitan e katalog, sehingga menghambat penyediaan</p>	Penyediaan buffer untuk Obat, Vaksin, dan BHP.
			2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi
				1) Persentase sumber daya manusia kesehatan di faskes memenuhi standar	1. Uji kompetensi bagi tenaga kesehatan; 2. Penempatan jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan tenaga kesehatan.	1. Penempatan tenaga kesehatan pada Jabatan yang tidak sesuai, 2. Pemberian tugas tambahan pada tenaga kesehatan diluar kompetensinya.	1. Penataan SDM Kesh di fasilitas kesehatan sesuai dengan komptensinya. 2. Mengurangi tugas tambahan diluar kompetensi tenaga kesehatan.
			3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			
				Persentase Penyedia Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	1) Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berijin; 2) Sarana produksi alkes kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang bersertifikat 3) TPM yang memenuhi syarat.	1) Adanya apotek, Toko Obat, Toko Alkes, UMOT yang tidak mampu memenuhi syarat izin operasional; 2) Adanya sarana produksi Alkes kelas I dan Perbekes yang tidak tidak bersertifikat; 3) Adanya TPM yang tidak dapat memenuhi syarat hygiene Sanitasi.	3. Pembinaan Pada Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, UMOT; 4. Pembinaan TPM.
			4	Program Pemberdayaan			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi
				Masyarakat Bidang Kesehatan			
				Persentase Rumah Tangga Sehat	1) Banyaknya Keluarga yang termasuk kategori keluarga Sehat; 2) Pelaksanaan Pembinaan PHBS secara berkelanjutan oleh Puskesmas 3) Ketersediaan Kader kesehatan di setiap Puskesmas	1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	Intervensi program Keluarga Sehat pada keluarga yang ada masalah kesehatan sesuai 12 indikator Keluarga Sehat melalui optimalisasi peran kader kesehatan dan petugas Puskesmas
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Komitmen seluruh karyawan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	Penguatan komitmen secara berkesinambungan

## 3.2. REALISASI ANGGARAN

### 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran

Untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilan yang dimaksud. Pelaksanaan kegiatan yang optimal dapat dilaksanakan apabila disukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan yang dimaksud besar dari APBD, APBN dan DBHCHT. Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang disajikan dalam tabel 3.9 berikut :

**Tabel 3.9**

**Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Program/Indikator Program	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Prorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			259,41%	134.462.382.373	124.185.273.184	89.18
				1) Angka Kematian Ibu (AKI)	96/100.000KH	134,49/100.000KH	71%			
				2) Angka Kematian Bayi (AKB)	6.6/1000 KH	7.02/1.000KH	94%			
				3) Angka Kematian Balita	5,4/1.000 KH	8.3/1.000KH	65%			
				4) Prevalensi Gizi Buruk	2%	0.59%	120%			
				5) Prevalensi Stunting	13%	6.3%	120%			
				6) Persentase Rumah Sehat	81%	88.46%	109%			
				7) Persentase Desa UCI	87%	73.20%	84%			
				8) Insiden Rate Penyakit Menular	1.2%	1,86%	65%			
	9) Insiden Rate penyakit DM dan HT	65%	77.99%	83%						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Program/Indikator Program	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
				10) Tingkat Kemandirian ODGJ Berat	65%	60.42%	93%			
				11) Persentase fasilitasi kesehatan memenuhi standar	80%	88.46%	111%			
				12) Persentase ketersediaan Obat, vaksin dan BHP di FKTP sesuai kebutuhan	94%	94%	100%			
			2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						
				1) Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di Faskes memenuhi Standar	100%	100%	100%	2.669.707.785	2.475.239.650	92.72%
			3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman						
				1) Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	58%	99.99%	120%	478.497.600	318.468.750	66.56%
			4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						
				1) Persentase Rumah Tangga Sehat	80%	46%	57%	1.252.574.600	1.015.644.890	81.08%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota						
				1) Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	92.836.350.283	83.701.685.235	90.17%
Total								231.699.512.641	211.696.311.709	89.52%

### 3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.
- Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target indikator kinerja pada periode tersebut tercapai

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan.

Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung ketreCAPaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam tabel 3.10 berikut:

**Tabel 3.10**  
**Efisiensi penggunaan Anggaran Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Anggaran 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP	A 81.5	A 81.83	100.4%	92.836.350.283	83.701.685.235	90.17%
Persentase capaian kinerja					100.4%	Persentase Penyerapan Anggaran		90.17%
Tingkat Efisiensi = 1.11 (Efisiensi tercapai)								
2	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM)	1.44	0.94	65.09%	138.863.162.358	127.994.626.474	81,51%
Persentase capaian kinerja					65.09%	Persentase Penyerapan Anggaran		92.17%
Tingkat Efisiensi = - (Efisiensi tidak tercapai)								

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 1.11 dalam pencapaian indikator sasaran kinerja Nilai SAKIP OPD dan untuk Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat tidak didapatkan efisiensi anggaran karena tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.

Hal yang berpengaruh dalam pencapaian efisiensi sebagaimana terlihat pada tabel 3.11 adalah komitmen yang cukup baik dari seluruh karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam penerapan SAKIP.

Selain itu, Sumber daya manusia juga merupakan salah satu aset dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tingkat efisiensi hasil capaian indikator kinerja terhadap ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Sumber Daya Manusia 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Kebutuhan SDM (ABK)	Ketersediaan SDM	% Ketersediaan SDM
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP	A 81.5	A 81.83	100.4%	348	88	25.29%
Persentase capaian kinerja					106.1%	Persentase Ketersediaan SDM		25.29%
Tingkat Efisiensi = 3.97 (Efisiensi tercapai)								
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM)	1.44	0.94	65.09%	348	88	25.29%
Persentase capaian kinerja					65.09%	Persentase Ketersediaan SDM		25.29%
Tingkat Efisiensi = - (Efisiensi tidak tercapai)								

Sumber : ABK Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia pada kisaran 3.97 dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Nilai SAKIP OPD. Sedangkan untuk pencapaian indikator Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat tidak didapatkan efisiensi.

Tingginya efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia kesehatan dalam pencapaian indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.11 adalah telah adanya pembagian tupoksi yang jelas antara masing masing individu di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sehingga setiap individu bertanggung jawab atas tupoksi yang diberikan kepadanya. Selain itu, tupoksi yang diberikan juga berpengaruh terhadap besaran TPP yang akan diterima oleh setiap individu sehingga setiap individu mempunyai motivasi yang cukup kuat untuk dapat melaksanakan tupoksi dan bertanggung jawab terhadap ketercapaian indikator kinerja dengan penuh tanggung jawab.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor pendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana terlihat pada tabel 3.12.

**Tabel 3.12**  
**Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Ketersediaan Sarana dan Prasarana Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Kebutuhan Sarpras	Ketersediaan Sarpras	% Ketersediaan Sarpras
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP	A 81.5	A 81.83	100.4%	77 item	42 item	54.55%
Persentase capaian kinerja					100.4%	Persentase Ketersediaan Sarpras		54.55%
Tingkat Efisiensi = 1.84 (Efisiensi tercapai)								
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM)	1.44	0.94	65.09%	77 item	42 item	54.55%
Persentase capaian kinerja					65.09%	Persentase Ketersediaan Sarpras		54.55%
Tingkat Efisiensi = - (Efisiensi tidak tercapai)								

Perhitungan efisiensi ketersediaan sarana dan prasarana dilihat berdasarkan pemenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pada tahun 2023. Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada kisaran 1.84 dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Nilai SAKIP OPD. Sedangkan pada indikator Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat tidak didapatkan efisiensi.

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa belum seluruh kebutuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di Dinas kesehatan Kabupaten Jombang. Tabel 3.12 juga menunjukkan adanya keterbatasan pemenuhan sarana dan prasarana di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang namun keterbatasan tersebut bukan menjadi kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### 3.3. UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Berdasarkan analisis kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, maka upaya perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak Balita secara terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor terkait serta optimalisasi MPDN;

- b. Penerapan *continuum of care* asuhan berkesinambungan adalah asuhan yang disediakan secara komprehensif disepanjang siklus hidup perempuan serta diberikan dalam tempat yang berkesinambungan mencakup rumah, komunitas, puskesmas, dan tempat rujukan;
- c. Optimalisasi program gerakan masyarakat sehat (Germas) sebagai upaya dalam perubahan perilaku masyarakat;
- d. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui *pentahelix collaborative governance* model di lingkup Kabupaten Jombang;
- e. Peningkatan penyediaan tenaga kesehatan esensial di Puskesmas melalui sistem kontrak BLUD Puskesmas.
- f. Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
- g. Memperbaiki pola rujukan dengan menjalin kerjasama FKTP dengan FKTL;
- h. Meningkatkan tingkat pengetahuan sasaran tentang Kesehatan ibu dan anak;
- i. Sweeping bagi balita yang tidak datang di Posyandu dengan melibatkan Puskesmas dan Kader Kesehatan;
- j. Pemberian Penyuluhan di posyandu tentang pola gizi seimbang bagi balita;
- k. Pemberian pelatihan PMBA bagi pengasuh balita;
- l. Penanganan Balita stunting dengan pendekatan pemenuhan Nutrisi bagi balita stunting;
- m. Peningkatan dukungan lintas sektor untuk menurunkan prevalensi stunting;
- n. Pemberian penyuluhan balita stunting bagi orang tua dan pengasuh balita;
- o. Kunjungan rumah dan pembinaan rumah sehat;
- p. Pendekatan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat kepada masyarakat untuk membangun opini masyarakat tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita;
- q. Peningkatan tracing, testing dan treatment penyakit menular di Masyarakat;
- r. Pelayanan di Posbindu PTM dalam rangka skrining kesehatan bagi penduduk usia produktif;
- s. Pemberian layanan konseling bagi masyarakat yang sehat, penderita Hipertensi dan Diabetes Mellitus;
- t. Memberikan terapi farmakologi, dan konsultasi kesehatan bagi penderita HT dan DM;
- u. Melakukan kerjasama lintas program dan lintas sector untuk peningkatan kesadaran keluarga pasien ODGJ Berat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan kesehatan kesehatan jiwa bagi penderita ODGJ Berat;
- v. Meningkatkan kinjungan rumah dan pendekatan intrapersonal pada penderita ODGJ berat agar mau mengakses layanan kesehatan jiwa;
- w. Penyediaan buffer untuk Obat, Vaksin, dan BHP untuk mencegah kekosongan obat, vaksin dan BHP di Puskesmas.

### **3.4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, maka tindakan perbaikan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan atas penetapan target kinerja tahun berikutnya dengan mengacu pada capaian tahun sebelumnya serta faktor lain yang mempengaruhi.
2. Melakukan revisi atas monitoring target jangka menengah dalam renstra dengan trend 3 (tiga) tahun periode serta penambahan progress capaian target jangka menengah untuk 15 indikator sasaran.
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisa yang lebih mendalam
4. Meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi sehingga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa belum seluruh IKU telah tercapai dengan baik sehingga diperlukan adanya upaya yang lebih nyata dalam rangka pencapaian kinerja organisasi pada periode selanjutnya berdasarkan analisa yang dilakukan secara mendalam terhadap factor penghambat dan pendorong keberhasilan kinerja.

#### **B. SARAN DAN REKOMENDASI**

Beberapa rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagai upaya peningkatan capaian kinerja untuk peningkatan mutu layanan UKP dan UKM sesuai standar mutu dan sesuai harapan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - a. Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
  - b. Memperbaiki pola rujukan dengan menjalin kerjasama FKTP dengan FKTL;
  - c. Meningkatkan tingkat pengetahuan sasaran tentang Kesehatan ibu dan anak;
  - d. Pencegahan dan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak Balita secara terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor terkait serta optimalisasi MPDN;
  - e. Penerapan continuum of care asuhan berkesinambungan adalah asuhan yang disediakan secara komprehensif disepanjang siklus hidup perempuan serta diberikan dalam tempat yang berkesinambungan mencakup rumah, komunitas, puskesmas, dan tempat rujukan;
  - f. Peningkatan pengendalian penyakit;
  - g. Sweeping bagi balita yang tidak datang di Posyandu dengan melibatkan Puskesmas dan Kader Kesehatan;
  - h. Pemberian Penyuluhan di posyandu tentang pola gizi seimbang bagi balita;
  - i. Pemberian pelatihan PMBA bagi pengasuh balita;
  - j. Penanganan Balita stunting dengan pendekatan pemenuhan Nutrisi bagi balita stunting;
  - k. Peningkatan dukungan lintas sektor untuk menurunkan prevalensi stunting;
  - l. Pemberian penyuluhan balita stunting bagi orang tua dan pengasuh balita;
  - m. Kunjungan rumah dan pembinaan rumah sehat;

- n. Pendekatan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat kepada masyarakat untuk membangun opini masyarakat tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita;
  - o. Peningkatan tracing, testing dan treatment penyakit menular di Masyarakat;
  - p. Pelayanan di Psobindu PTM dalam rangka skrining kesehatan bagi penduduk usia produktif;
  - q. Pemberian layanan konseling bagi masyarakat yang sehat, penderita HT dan DM;
  - r. Memberikan terapi farmakologi, dan konsultasi kesehatan bagi penderita HT dan DM;
  - s. Melakukan kerjasama lintas program dan lintas sector untuk peningkatan kesadaran keluarga pasien ODGJ Berat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan kesehatan kesehatan jiwa bagi penderita ODGJ Berat;
  - t. Meningkatkan kunjungan rumah dan pendekatan intrapersonal pada penderita ODGJ berat agar mau mengakses layanan kesehatan jiwa;
  - u. Penyediaan buffer untuk Obat, Vaksin, dan BHP untuk mencegah kekosongan obat, vaksin dan BHP di Puskesmas.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Capaian kinerja Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan dilakukan dalam bentuk kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota sudah bagus, namun masih ada hal yang harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standard dan terpetakan dengan baik pada fasilitas kesehatan yang membutuhkan yaitu:
- a. Penataan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan kompetensinya;
  - b. Penyusunan analisis jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing masing individu di lingkup Dinas Kesehatan;
  - c. Pengurangan tugas tambahan diluar kompetensi tenaga Kesehatan dalam rangka peningkatan capaian kinerja;
  - d. Peningkatan penyediaan tenaga kesehatan esensial di Puskesmas melalui sistem kontrak BLUD Puskesmas.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dalam kegiatan Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar sudah baik capaian kinerjanya, tetap dipertahankan dengan melakukan hal berikut:
- a. Validasi data penyedia sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman termasuk Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
  - b. Pembinaan kepada penyedia sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman termasuk Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) secara berkala dalam

mewujudkan standarisasi penyedia farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman;

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dalam bentuk kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dukungan dana DBHCHT terhadap FKTP tetap dipertahankan. Hal yang harus dioptimalkan sebagai Upaya peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya adalah:
  - a. Intervensi program Keluarga Sehat pada keluarga yang ada masalah kesehatan sesuai 12 indikator Keluarga Sehat;
  - b. Intervensi pada Rumah Tangga yang ada masalah pada pemenuhan indikator PHBS.
  - c. Optimalisasi program gerakan masyarakat sehat (Germas) sebagai upaya dalam perubahan perilaku masyarakat;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam bentuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tetap dipertahankan. Hal yang harus diperhatikan kedepan adalah:
  - a. Penyusunan rencana anggaran disesuaikan dengan capaian indikator kinerja pada periode sebelumnya serta permasalahan yang ada;
  - b. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk realisasi anggaran dan kegiatan sebagai dasar untuk perbaikan perencanaan;
  - c. Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Diharapkan dalam tahun-tahun berikutnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai bahan kegiatan untuk perbaikan dalam penyusunan Rencana Strategis sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dengan menetapkan upaya penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Jombang, 6 Pebruari 2024  
Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Jombang  
SYAFIL ANWAR, ST  
NIB. 197803192005011015

